



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 188-45/765/RPTS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang perlu dihunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

20. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 967);
21. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 608).
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;

- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,

The block contains the official stamp of the Bupati Tapanuli Selatan, which is a circular emblem with a central figure and the words 'BUPATI TAPANULI SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Dolly Pasaribu'.

DOLLY PASARIBU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.45/765/KPTS/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022.
TENTANG :

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
1	Drs. Abinur Nasution NIP. 19690607 199703 1 003	IV/b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pendidikan Daerah
2	Rabiul Marzuki, SKM NIP.19770310 200701 1 003	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Kesehatan Daerah
3	Afrida Yeni Simatupang, S.Sos NIP.19770401 200604 2 015	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
4	Atika Utami Alpia, ST NIP.19850727 201903 2 005	III/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah
5	Elpina Siregar, S. Sos NIP.19770316 199703 2 001	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
6	Marhamah, S.Sos NIP.19840425 200604 2 017	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Sosial Daerah
7	Jukhri Diapari, S.P NIP.19810328 201101 1 006	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah.
8	Yusnora Pohan, SPd NIP.19820309 200502 2 001	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Siti Nurbaya Tumanggor, SP NIP.19850324 201101 2 012	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
10	Muhammad Syarif Pane, SH NIP.19670721 199703 1 003	IV/b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
11	Ambia, S. IP NIP.19730501 199303 1 006	IV/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
12	Lena Sartika, S.Pd NIP.19820917 201101 2 010	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
13	Ikhsan M. Hasibuan, MM NIP.19750617 200701 1 005	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
14	Minhaja Daulay, SH NIP.19681003 199303 2 003	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Perhubungan Daerah
15	Angga, S.Kom. NIP.19920127 201903 1 007	III/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
16	Marwan Adian Harahap, SH NIP.19750202 200701 1 002	III/b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
17	Syamiddin Tambunan NIP.19660820 199312 1 001	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
18	Muhammad Hasibuan, SP NIP.19660611 198703 1 005	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Perikanan Daerah
19	Ahmad Fauji, S.Kom, MM NIP.19830428 201001 1 007	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pariwisata Daerah
20	Tuty Haryati Pakpahan, SP NIP.19760213 200701 2 021	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Pertanian Daerah
21	Zubaidah Syahdiah, SP NIP.19771029 200701 2 001	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah
22	Dahlinawati, S.Ag NIP.19671010 199803 2 004	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Dinas Perindustrian Daerah.
23	Into Marlina Siregar, S.Pt, MM NIP.19771112 200801 2 005	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Inspektorat Daerah
24	Nuraini Ritonga, S.Sos NIP.197820209 200701 2 003	III/b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Nur Ainun Sagala, S.Sos NIP.19830607 200701 2 002	III/b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
26	Sri Wahyuni Harahap, S. Psi NIP.19840522 201101 2 012	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
27	Esna Berlian NIP.19700912 199103 2 007	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	M. Ayubsani Siregar, S.Sos, MM NIP.19761213 200502 1 001	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Sekretaris Daerah Kabupaten
29	Arwan Siregar, S. Sos NIP.19750819 199503 1 001	IV/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30	Azam Hasibuan, SH NIP.19660110 198603 1 004	IV/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
31	Imron Ritonga NIP.19700325 201001 1 004	II/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Aek Bilah

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
32	Elvi Zuraidah Nasution, S.Sos NIP.19680521 198903 2 002	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Angkola Barat
33	Arniwati Ritonga, S.Sos NIP.19711020 201001 2 003	III/b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Angkola Sangkunur
34	Efi Diana A.Md. NIP.19820428 200904 2 002	III/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Angkola Selatan
35	Rina Kherawati, S.Sos NIP.19780411 200801 2 003	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Angkola Timur
36	Sahwan Ritonga, S.Sos NIP.19670330 199907 1 001	IV/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Arse
37	Irwansyah Siagian, SKM NIP.19830314 200604 1 007	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Batang Angkola
38	Mukhlis Siregar NIP.19650924 198503 1 003	III/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Batang Toru
39	Ramadan Ritonga NIP.19660401 199003 1 008	III/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Marancar
40	Saro Eli Bu'ulolo, A.Ma.Pd NIP.19650517 198604 1 003	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Muara batang Toru
41	Sahattua Ritonga NIP.19750220 200906 1 002	II/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Saipar Dolok Hole
42	H. Zulkarman, S. Pd NIP.19801101 200701 1 002	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Sayur Matinggi
43	Muhammad Arifin, S.Ag., MM NIP.19770408 200502 1 001	IV/a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Sipirok
44	Lukman Siregar NIP.19750228 200904 1 004	III/d	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Tano Tombangan Angkola
45	Tinur Bagani Hsb NIP.19780513 200701 2 001	III/c	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Camat Angkola Muaratais

BUPATI TAPANULI SELATAN,





BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 180.45/766/KPTS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH /UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang perlu dihunjuk Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

20. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 967);
21. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 608).
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang-barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antaralain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyiapkan asli / fotokopi / salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,



Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
- 3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
 NOMOR : 188.45/766/KPTS/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG :

PENGHUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
1	Ian Aminullah Jasfan Pohan, SH, M.Pd NIP.19760403 201101 1 010	III/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pendidikan Daerah
2	Rina Sova Hairani Lubis S.Sos NIP.19810331 201001 2 002	III/b	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Kesehatan Daerah
3	Listiati Siregar, SE NIP.19761212 200312 2 005	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
4	Afriyal Pratama, ST NIP.19940406 201903 1 009	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah
5	M. Ridoan Dalimunthe NIP.19790812 200701 1 005	II/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
6	Khairuddin Siregar NIP.19700822 200701 1 005	I/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Sosial Daerah
7	Irma Wantiri Rambe NIP.19840331 2003 04 2 003	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah.
8	Marwansyah Parlindungan, SKM NIP.19710724 199803 1 002	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Nurbasani NIP.19770427 199903 2 002	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
10	Fina Ramadhani Pohan, S.Sos NIP.19840610 201001 2 002	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
11	Sefriani Anita, SE NIP.19830716 201101 2 017	III/b	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
12	Mahyuddin, SE NIP.19790211 200903 1 001	III/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
13	Dimpu Surya Erlina, Am.Keb NIP.19750213 200701 2 004	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
14	Apia Dharma Chandra NIP.19820530 200904 1 002	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Perhubungan Daerah

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
15	Arpan Marwazi NIP.19800505 201001 1 002	II/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
16	Baktiar Harahap, SE NIP.19760827 200701 1 004	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
17	Ahmad Faisal, SH NIP.19811203 201001 1 001	III/b	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
18	Nurasmila Siregar NIP.19850612 200904 2 006	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Perikanan Daerah
19	Syamsul Tanjung NIP.19790313 200904 1 003	II/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pariwisata Daerah
20	Bambang Suryanto NIP.19760911 201001 1 001	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Pertanian Daerah
21	Hilmansyah Lubis, SE NIP.19760809 201101 1 004	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah
22	Khoiruddin Hasibuan, SE NIP.19780321 200701 1 002	III/b	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Dinas Perindustrian Daerah.
23	Devi Afanty Daulay, SE NIP.19790113 201101 2 003	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Inspektorat Daerah
24	Ramadan Siregar NIP.19860227 201001 1 001	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Latifah Sari Siregar NIP.19761102 200312 2 003	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
26	Santi Lestari Nainggolan, SE NIP.19930604 201903 2 014	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
27	Riduan Harahap NIP.19850915 200701 1 005	II/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Rijo Sumardi NIP.19670724 200604 1 001	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Sekretaris Daerah Kabupaten
29	Maslatifah Harahap, SH NIP.19820831 201001 2 002	III/b	Pengurus Barang Pengguna	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30	Darmawansyah Siregar NIP.19820206 201101 1 004	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
31	Tongku Ritonga NIP.19680825 200906 1 004	II/a	Pengurus Barang Pengguna	Camat Aek Bilah
32	Nurmerina Harahap, S.Sos NIP. 19821122 200604 2 005	III/b	Pengurus Barang Pengguna	Camat Angkola Barat
33	Ali Husni Matondang NIP.19661017 199302 1 001	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Camat Angkola Sangkunur

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
34	Sutan Mudo Siregar NIP.19680502 200906 1 003	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Camat Angkola Selatan
35	Parlindungan Harahap NIP.19680110 200701 1 038	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Camat Angkola Timur
36	MHD Tamrin Siregar NIP.19790222 200902 1 001	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Camat Arse
37	Agussalim Daulay NIP.19660615 200003 1 003	II/c	Pengurus Barang Pengguna	Camat Batang Angkola
38	Priyanto NIP.19750123 200701 0 020	II/a	Pengurus Barang Pengguna	Camat Batang Toru
39	Risman Efendi Lubis NIP.19840417 200312 1 006	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Camat Marancar
40	Suyanto, S.Sos NIP.19770920 200904 1 004	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Camat Muara batang Toru
41	Morgong Dalimunthe NIP.19710301 200906 1 005	II/d	Pengurus Barang Pengguna	Camat Saipar Dolok Hole
42	Maragabe Siregar NIP.19720518 199403 1 004	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Camat Sayur Matinggi
43	Ibrahim Siregar NIP.19680816 200906 1 009	I/c	Pengurus Barang Pengguna	Camat Sipirok
44	Lanniari Hasibuan NIP.19830816 200701 2 001	III/c	Pengurus Barang Pengguna	Camat Tano Tombangan Angkola
45	Ali Atas NIP.19720306 200604 1 011	III/a	Pengurus Barang Pengguna	Camat Angkola Muaratais

BUPATI TAPANULI SELATAN,



DOLLY PASARIBU

Dolly Pasaribu